



MEMBANGUN KELEMBAGAAN UNTUK MENYELAMATKAN SDA DARI KORUPSI

Agus Heruanto Hadna

Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan

UGM

Pengelolaan Sektor SDA yg berpotensi korupsi

- Endowment hasil SDA--
-rent seeking,
patronase
- Manajemen SDA—bad
governance, kebocoran,
inefisiensi



Kemunculan *Rent-Seekers*

- Di negara kaya migas, banyak individu trampil lebih beralih menjadi birokrat migas ketimbang menjadi entrepreneur karena lebih menguntungkan menjadi *rent seekers* ketimbang jadi pengusaha
- Kemunculan *rent seekers* ini semakin kuat ketika kelembagaan pemerintah lemah (*bad governance*) karena instrument patronase lebih berperan ketimbang unsur demokrasi.
- Banyaknya *rent seekers* ini menyebabkan “kue migas” menjadi rebutan banyak pemburu rente sehingga berakibat melemahnya “kue migas” sbg produksi nasional. Seharusnya “kue migas” menjadi modal pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Manajemen SDA yang korup

Prakondisi manajemen yang menyebabkan terjadinya korupsi:

- a. Adanya iming2 keuntungan finansial yang sangat besar
- b. Adanya pejabat public yang berkarakter *moral hazard*, tetapi memiliki otoritas pengambilan keputusan yang strategis
- c. Adanya peluang untuk korupsi: tidak ada system control, in-accountability & in-transparency management
- d. Lingkungan politik yang tidak kondusif: politik balas budi, patron-client, crony-capitalism

Kapan?

1. Sebelum operasi migas: model manajemen, kepemilikan, sharing keuntungan, posisi ladang migas
2. Selama operasi migas: berapa kapasitas sumberdaya yg akan dieksploitasi, harga, lama kontrak, siapa yg memberi izin perpanjangan



Best practices

- **Botswana**: dinilai berhasil dalam pencegahan korupsi karena: 1) **Factor leadership** yakni Presiden Seretse Khama, (1966-1980), diteruskan presiden Festus Mogae (1998-2008): “kampanye anti korupsi apapun yg berupaya memberikan kekebalan kepada kelompok individu manapun pasti akan gagal karena kekurangan unsur yg begitu esensial bagi keberhasilannya, yakni kepercayaan dan dukungan public”. 2) **Membentuk Lembaga anti korupsi** (DCEC) yg langsung dibawah kantor presiden dan kepala diseleksi oleh presiden. 3) **Pengadilan yg independent**. 4) **Birokrasi yg netral**. 5) **Transparansi dan partisipasi pembuatan kebijakan** khususnya anggaran



Best practices

- **Estonia:** atmospherenya dipengaruhi oleh spirit keluar dari regime Uni Soviet, maka PM Mart Laar membuat kebijakan: 1) Reformasi radikal peradilan dan system administrasi publik; 2) Privatisasi BUMN Estonia yg inclusive dan terbuka; 3) Pengembangan e-govt dan keterbukaan informasi public; 4) Memperkuat civil society
- **Korea Selatan:** dimulai dari transisi menuju system demokrasi (1987) korsel membuat kebijakan: 1) mempersempit *crony capitalism* dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah; 2) Reformasi pelayanan public; 3) Mengembangkan e-govt dan keterbukaan informasi public; 4) Menguatnya civil society



Jadi faktor apa yg perlu diintervensi?



Kepemimpinan politik dan komitmennya terhadap anti korupsi



Kesadaran politik warganegara dan menguatnya civil society (citizenship)



Membangun kesadaran tindakan kolektif pada tingkat civil society



Membangun governance melalui reformasi kebijakan yg inklusif, system pemerintahan dan pelayanan public yang akuntabel, netralitas birokrasi, dan keterbukaan informasi

Karakter Inklusivitas Kebijakan SDA :

- Proses formulasi: partisipasi public
- Policy problem: evidence based
- Tipe kebijakan: protective, distributive dan redistributive
- Tujuan: penguatan ekonomi, keadilan dan perlindungan
- Instrumen: insentif dan disinsentif melalui subsidi, pajak, pengakuan hukum, dsb
- Implementor: kapasitas, integritas, independence
- Target group: komunitas terdampak, lingkungan, pemerintah, dan perusahaan

